

KAJIAN ANALISIS KEMAMPUAN EKONOMI PEMBENTUKAN CALON KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR DARI KABUPATEN KARIMUN

Oleh

H. BASUKI RACHMAT

ABTRAK

Pemekaran wilayah merupakan untuk mendekatkan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, calon Kabupaten Kepulauan Kundur, sebuah wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah daerah otonom baru, yang lepas dari Kabupaten Karimun. Hal ini dimaknai adanya aspirasi masyarakat yang sangat kuat di beberapa daerah kepulauan dalam wilayah kecamatan pulau Kundur, Pulau Durai dan beberapa pulau lainnya.

Pembentukan suatu daerah otonom baru bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh kondisi realitas yang ada seperti : a) kemampuan dari segi ekonomi, b) memperluas pengembangan potensi daerah, c) kebutuhan pemerataan pembangunan, d) kondisi geografis kewilayahan, e) kebutuhan pelayanan masyarakat, dan f) kebutuhan akan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembentukan suatu daerah otonom baru di Kabupaten Karimun yang dilandasi oleh berbagai kebutuhan mendesak.

calon Kabupaten Kepulauan Kundur, merupakan wilayah yang memiliki wilayah laut cukup luas, memiliki daratan yang sangat subur, untuk diberdayakan budidaya pertanian tanaman pangan, tanaman produksi, Berdasarkan PP 78 Tahun 2007, terdapat 11 persyaratan bagi Pembentukan sebuah daerah otonom baru, meliputi : 1, Kependudukan, Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Kemampuan Keuangan, Sosial Budaya, Sosial Politik, Keamanan, Pertanahan, Kesejahteraan Masyarakat (IPM, dan Rentang Kendali.

Pada faktor kemampuan ekonomi daerah calon Kabupaten Kepulauan Kundur, hasil kajian analisis mendapatkan point sebesar 60 point, berarti memenuhi salah satu syarat dari 11 syarat yang harus dipenuhi. Namun demikian untuk menjadi daerah otonom baru masih harus memenuhi 10 persyaratan lagi, sehingga perjalanannya masih panjang.

Kata kunci: kajian, analisis, kemampuan, ekonomi, daerah.

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan untuk mendekatkan rentang kendali pelayanan kepada masyarakat, calon Kabupaten Kepulauan Kundur, sebuah wilayah kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah daerah otonom baru, yang lepas dari Kabupaten Karimun. Hal ini dimaknai adanya aspirasi masyarakat

yang sangat kuat di beberapa daerah kepulauan dalam wilayah kecamatan pulau Kundur, Pulau Durai dan beberapa pulau lainnya.

SEJARAH PEMBENTUKAN CALON KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

Pembentukan suatu daerah otonom baru bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilandasi oleh kondisi realitas yang ada

seperti : a) kemampuan dari segi ekonomi, b) memperluas pengembangan potensi daerah, c) kebutuhan pemerataan pembangunan, d) kondisi geografis kewilayahan, e) kebutuhan pelayanan masyarakat, dan f) kebutuhan akan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pembentukan suatu daerah otonom baru di Kabupaten Karimun yang dilandasi oleh berbagai kebutuhan mendesak yaitu :

- a. Berawal dari kebutuhan bersama untuk membentuk sebuah daerah otonom baru maka pada tanggal 19 Januari 2009 berkumpul beberapa masyarakat untuk membicarakan masa depan Kunder, yang disebut dengan Tim Inisiator pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder.
- b. Keberadaan Tim Inisiator pertama kali adalah melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Karimun dari Daerah Pemilihan Kunder, Kunder Utara dan Kunder Barat tanggal 25 Januari 2010 yang membahas tentang masa depan Kunder, dengan hasil disarankan kepada Tim Inisiator untuk melakukan sosialisasi, merangkul semua elemen masyarakat dan khususnya masyarakat Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai serta membentuk kelembagaan yang lebih besar untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kunder.
- c. Setelah kegiatan tersebut, mulai berkembang isu yang berada di masyarakat baik yang mendukung pembentukan maupun yang belum mendukung pembentukan Kabupaten Kunder. Adanya pro dan kontra terhadap pembentukan Kabupaten Kunder dijawab oleh Tim Inisiator pembentukan Kabupaten Kunder dengan melakukan sosialisasi pertama bersama anggota DPRD Kabupaten Karimun daerah pemilihan Kunder, Kunder Utara dan Kunder Barat pada masa reses, kegiatan sosialisasi tersebut digelar pada 24 Maret 2010 di Hotel Gembira Tanjung Batu.
- d. Setelah berselang dari pertemuan tanggal 24 Maret 2010 tepatnya pada tanggal 19 April 2011 diadakan pertemuan kembali untuk melakukan sosialisasi dan Tim Formatur Pembentukan Kabupaten Kunder. Tim ini bertugas untuk mengadakan kegiatan musyawarah seluruh masyarakat untuk menghantarkan ke pembentukan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kunder. Pada pertemuan ini diundang peserta dari Kunder, Kunder Utara, Kunder Barat, Moro dan Durai bertempat di Hotel Gembira Tanjung Batu Kunder. Saat itu dipilih H. Huzrin Hood sebagai Ketua dan Ing. Iskandarsyah sebagai sekretaris, dengan anggota Drs. H. Abdul Malik, MM, Ihsan, SH, Katwanto, SE, R. Zuriantiaz, Drs, Muhammad Nasir, Drs. Muhammad Zen, dan Darmawan.
- e. Selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2011, Tim Formatur Pembentukan Kabupaten Kunder melakukan kegiatan sosialisasi dan Pembentukan Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kunder. Hadir pada waktu itu, tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa petinggi daerah dari Kunder, Kunder Utara, Kunder Barat, Moro dan Durai. Pada saat itu juga rencana pembentukan Kabupaten Kunder diubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Kunder, mengingat memang dari segi geografis dan kabupaten ini nantinya akan didukung oleh gugusan beberapa pulau disekitar pulau Kunder, Moro dan Durai.
- f. Terpilih Ihsan Muharal, SH sebagai Ketua Formatur Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder (BP2K3), sekaligus sebagai ketua Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kunder dari unsur Kecamatan Kunder dengan anggota Pendi Irano, dari unsur Kecamatan Kunder Utara, R. Zuarintiaz dari Kecamatan Kunder Barat, Agistamar dari Kecamatan Moro, dan

Aswandi dari Kecamatan Durai. Kepada mereka diamanatkan untuk membentuk kepengurusan secara lengkap dan pada saat itu juga dilakukan pembacaan deklarasi aspirasi masyarakat Kundur, Kundur Utara, Kundur Barat, Moro, dan Durai.

- g. Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) diberi wewenang berdasarkan musyawarah pada tanggal 29 Mei 2011 untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur menjadi daerah otonom dari di Provinsi Kepulauan Riau.

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

Adapun dasar hukum pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dari Kabupaten Karimun bersumber pada :

- a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 18
- b. Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884).

- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237).
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791).
- f. Keputusan DPRD Kabupaten Karimun Nomor 08 Tahun 2012 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Terhadap Usulan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.
- g. Rekomendasi Surat Bupati Kabupaten Karimun Nomor 100/Pem/59/2012 tanggal 30 April 2012 perihal Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, persyaratan pembentukan daerah otonom baru harus memenuhi kriteria-kriteria kemampuan sebagai berikut.

- a. Kependudukan;
- b. Kemampuan Ekonomi;
- c. Potensi Daerah;
- d. Kemampuan Keuangan;
- e. Sosial Bu-

daya; f. Sosial Politik; g. Luas wilayah/daerah; h. Pertahanan; i. Keamanan; y. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat; k. Rentang Kendali. (Sumber: Laporan akhir tim kajian akademik IPDN, tentang pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Kundur dari Kabupaten Karimun Tahun 2012).

PERMASALAHAN

Permasalahan timbulnya aspirasi masyarakat, untuk membentuk calon Kabupaten Kepulauan Kundur, hal ini disebabkan adanya rentang kendali pelayanan yang sangat jauh dari Pemerintahan Kabupaten Karimun. Jarak tempuh antara Kabupaten Karimun dengan calon Kabupaten Kepulauan Kundur berjarak cukup jauh dan harus ditempuh selama hampir satu setengah jam dengan menggunakan motor boot., calon Kabupaten Kepulauan Kundur merupakan wilayah memiliki wilayah laut yang cukup luas, dan luas daratan dengan lahan yang subur, dengan kondisi yang sangat strategis, dimana calon Kabupaten Kepulauan Kundur merupakan wilayah terdepan dan merupakan pintu masuk atau sebagai gerbang untuk masuknya ke wilayah Indonesia di bagian barat. Wilayah calon Kabupaten Kepulauan Kundur merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam, dan memiliki sumber daya yang mumpuni, di mana hampir sebahagian besar para pejabat di Kabupaten Karimun merupakan lahir di Kepulauan Kundur, dan masih banyak sumber daya manusia Kepulauan Kundur yang memiliki potensi sebahagian besar bekerja diluar Kepulauan Kundur. Potensi ekonomi dapat dikembangkan dengan kondisi luas wilayah laut yang sangat luas, dan luas lahan pertanian yang subur untuk dikembangkan, adanya potensi tambang timah, produksi gambir yang sangat potensial dan potensi wisata pantai dan wisata budaya yang sangat menarik dan calon Kabupaten Kepulauan Kundur merupakan wilayah sangat dekat

berbatasan dengan negara tetangga Malaysia, dan Singapura, merupakan pintu gerbang masuknya wisata asing di Indonesia bagian barat. Dengan kondisi berbagai permasalahan ini penulis tertarik untuk membuat sebuah jurnal ilmiah atas dasar kajian akademik, secara kebetulan penulis merupakan bagian dari anggota tim kajian membidangi kemampuan ekonomi calon pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dari Kabupaten Karimun.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari berbagai permasalahan yang terurai tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasi masalah dimaksud meliputi :

- a. Luasnya wilayah laut cukup luas dicalon Kabupaten Kepulauan Kundur, memiliki potensi sumber daya kelautan yang dapat dikembangkan sebagai salah satu indikator peningkatan kemampuan ekonomi;
- b. Luas lahan pertanian, dengan sub sektor pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan sangat subur, dan ini juga merupakan indikator bagi peningkatan ekonomi;
- c. Jumlah penduduk yang sangat cukup;
- d. Dekatnya rentang kendali pelayanan kepada masyarakat;
- e. Dekat dengan negara tetangga seperti dengan Malaysia, dan Singapura, ini juga merupakan potensi pengembangan pariwisata sebagai potensi peningkatan kemampuan ekonomi.

Dan masih banyak potensi lain yang dapat digali dan dikembangkan untuk memberikan kontribusi peningkatan kemampuan ekonomi calon Kabupaten Kepulauan Kundur.

RUMUSAN MASALAH

Dari berbagai identifikasi permasalahan dimaksud peneliti mencoba merumuskan masalah yang terkait dengan masalah peningkatan kemampuan ekonomi calon Kabupaten Kepulauan Kundur.

- a. Berapa nilai indikator-indikator faktor kemampuan ekonomi yang diperoleh calon Kabupaten Kepulauan Kundur.
- b. Potensi apa yang dapat dikembangkan di calon Kabupaten Kepulauan Kundur.
- c. Bagaimana kemampuan SDM calon Kabupaten Kepulauan Kundur.

MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Maksud penelitian adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan ekonomi calon pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dari Kabupaten Karimun, sehingga layak untuk dijadikan daerah otonom baru.

Tujuan penelitian, adalah apakah setelah dinyatakan layak menjadi sebuah daerah otonom baru, calon Kabupaten Kepulauan Kundur dapat meningkatkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat dapat terwujud seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat pada aspirasi awal pembentukan.

► Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Dalam mengembangkan potensi ekonomi tidak boleh dilupakan perlunya membangun yang sifatnya berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak boleh sampai menguras sumber daya alam dan merusak lingkungan. Fungsi lingkungan dalam pembangunan harus tetap dijaga dan dipertahankan. Lingkungan berfungsi sebagai bahan baku untuk industri pengolahan, sebagai pengolahan limbah alami (*natural asimilator*), dan sebagai sumber kesenangan dan kenyamanan hidup. Dalam hal ini pemerintah daerah harus tetap bertindak sebagai pengawas dalam pembangunan, sehingga pembangunan yang terjadi di daerah tidak akan merusak sumber daya alam dan lingkungan. Pemerintah daerah sebaiknya menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan.

► Strategi Pembangunan yang Efisien

Kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang efisien harus dapat diusahakan agar pembangunan ekonomi daerah benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Berbagai cara dapat ditempuh untuk mencapai efisiensi disegala bidang kehidupan di antaranya adalah dengan cara :

- a. Tingkatkan produktivitas
Meningkatkan produktivitas bagi kegiatan apa saja atau dengan cara menggunakan input tertentu untuk menghasilkan lebih banyak output; atau dengan menghasilkan output dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan cara menggunakan input sesedikit mungkin merupakan sasaran kegiatan perekonomian.
- b. Hapuskan sebab-sebab ekonomi biaya tinggi.

Ekonomi biaya tinggi yang sangat dikenal yang dialami perekonomian Indonesia adalah karena adanya tarif dan pungutan resmi maupun tidak resmi, terjadi dalam setiap kegiatan; tidak hanya dalam bidang produksi dan distribusi, tetapi juga dalam bidang konsumsi maupun pelayanan apa saja.

► Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendanaan sangat penting bagi berhasilnya pembangunan ekonomi suatu daerah dan sangat penting bagi berhasilnya pembangunan ekonomi suatu daerah atau suatu negara. Namun demikian tidak berarti bahwa tanpa modal kita lalu tidak dapat membangun sama sekali. Perlu disadari pula bahwa sesungguhnya modal atau dana itu lebih merupakan faktor pelengkap dan akibat dari pembangunan serta bukan merupakan sebab dari pembangunan. Dengan semangat untuk membangun dan mampu meningkatkan kemampuannya lewat kemauan yang kuat tadi, niscaya modal dan dana akan datang untuk

menolong masyarakat daerah tersebut. Jadi yang utama adalah membangun terlebih dahulu, maka nanti akan tercipta kenaikan pendapatan dan tabungan masyarakat yang disusul dengan peningkatan kemampuan investasi dan tabungan masyarakat yang disusul dengan peningkatan kemampuan ekonomi. (M. Suparmoko, 2001: 104 - 106). Dari kajian teori terkait dengan pembangunan ekonomi, tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan, dan Strategi

pembangunan yang efisien, dengan beberapa indikatornya. Misalnya tingkat produktivitas, memperkecil biaya tinggi, dan peningkatan PAD daerah yang bersangkutan.

BAHASAN

GAMBARAN UMUM CALON PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

Luas wilayah dan kecamatan, jumlah penduduk, serta kepadatan penduduk per km² calon Kabupaten Pemekaran Kepulauan Kundur

Tabel 1

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk calon Kabupaten Kepulauan Kundur Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	2	3	4	5
1	Kundur	116,00	43.011	371,10
2.	Kundur Barat	288,82	19.317	66,88
3.	Kundur Utara	37,61	14.034	373,15
4.	Durai	1.470,54	7.408	4,83
5.	Ungar	368,33	6.426	17,45
6.	Belat	501,64	8.429	16,80
Jumlah		2.844,24	98.625	
Jumlah seluruhnya		7.984,00	279.752	
Rata-rata		665,33	38.407	141,70

Sumber : BPS Kabupaten Karimun Tahun 2012

CAKUPAN WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN KUNDUR

Rencana pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dari aspek kewilayahan baik jumlah kecamatan maupun luas wilayahnya lebih luas dari Kabupaten Induk Karimun. Untuk memenuhi persyaratan PP 78 Tahun 2007, maka luas cakupan wilayah calon Kabupaten Kepulauan Kundur dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2

Rencana Luas Cakupan Kewilayahan Calon Kabupaten Kepulauan Kundur Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Kabupaten Karimun (Km ²)
1	2	3
1.	Kundur	115,90
2.	Kundur Utara	37,61
3.	Kundur Barat	288,82
4.	Durai	1.532,54
5.	Ungar	368,33
6.	Belat	501,04
Jumlah		2.844,24

Sumber: Hasil Olahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

► **Faktor Kemampuan Ekonomi**

Faktor kemampuan ekonomi calon Kabupaten Kepulauan Kundur dikaji dari indikator PDRB Non Migas Per kapita ADHB, Pertumbuhan Ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB Non migas ADHK dan Kontribusi PDRB Nonmigas ADHB Kabupaten terhadap PDRB Nonmigas ADHB Provinsi.

► **Indikator PDRB**

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu. PDRB terdiri dari PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Konstan.

a. **PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku**

PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku adalah Jumlah nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi/muncul di suatu daerah pada periode tertentu. PDRB calon Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3

PDRB Non Migas calon Kabupaten Kepulauan Kundur Atas Dasar Harga Berlaku dari Tahun 2007 – 2011 (dalam jutaan rupiah)

No.	Kabupaten	PDRB Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
2	Kepulauan Kundur	1.097.466,62	1.240.783,76	1.374.838,22	1.543.586,50	1.732.917,98

Sumber: BPS Karimun tahun 2012

b. **PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Konstan**

PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Konstan adalah nilai PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku yang telah diperhitungkan dengan inflasi, di mana untuk tahun 2007 sampai 2011 di calon Kabupaten Kepulauan Kundur menggunakan harga dasar tahun 2000. PDRB ADHK di calon Kabupaten Kepulauan Kundur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4

PDRB Non Migas calon Kabupaten Kepulauan Kundur Atas Dasar Harga Konstan dari Tahun 2007 – 2011 (dalam jutaan rupiah)

No.	PDRB Kabupaten	PDRB Tahun				
		2007	2008	2009	2010	2011
2	Kepulauan Kundur	611.831,86	648.769,93	689.651,75	734.915,45	786.702,46

Sumber: BPS Karimun Tahun 2012

► **Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi dihitung dengan menggunakan pertumbuhan nilai PDRB Non Migas ADHK pada tahun tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan nilai PDRB Non Migas ADHK pada periode tahun sebelumnya. Dalam hal ini calon Kabupaten Kepulauan Kundur menggunakan perbandingan tahun 2011 dengan periode tahun 2008 – 2010.

a. **Atas Dasar Harga Berlaku**

Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Non Migas berdasarkan Harga Berlaku calon Kabupaten Kepulauan Kundur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 5

Laju Pertumbuhan PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku calon Kabupaten Kepulauan Kundur dari Tahun 2008 – 2011

No.	Kabupaten	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun			
		2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1	2	3	4	5	6
2	Kepulauan Kundur	13,06	10,80	12,27	12,27

Sumber: BPS Kabupaten Karimun Tahun 2012 (dilakukan konversi)

b. Atas Dasar Harga Konstan

Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Non Migas berdasarkan Harga Konstan calon Kabupaten Kundur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 6

Laju Pertumbuhan PDRB NonMigas Atas Dasar Harga Konstan calon Kabupaten Kepulauan Kundur dari Tahun 2008 – 2011

No.	Kabupaten	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun			
		2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
1	2	3	4	5	6
2	Kepulauan Kundur	6,03	6,03	6,56	7,05

Sumber: BPS Kabupaten Karimun Tahun 2012 (dilakukan konversi)

► **Indikator Kontribusi PDRB**

Kontribusi PDRB adalah kontribusi PDRB Non Migas kabupaten/kota terhadap PDRB Non Migas provinsi dan atau presentase PDRB Non Migas provinsi terhadap PDRB Nasional.

a. Kontribusi PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku

Indikator PDRB Non Migas ADHB calon Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan Harga Berlaku terhadap PDRB Non Migas ADHB Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 7

Kontribusi PDRB Non Migas calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap PDRB Non Migas Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku dari Tahun 2007 – 2011

No.	Kabupaten	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Provinsi Tahun				
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
2	Kepulauan Kundur	1,88	2,12	2,35	2,64	2,97

Sumber: BPS Kabupaten Karimun Tahun 2012 (dilakukan konversi)

b. Kontribusi PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Konstan

Indikator kontribusi PDRB Non Migas ADHK calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap PDRB Non Migas ADHK Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel di bawah

Tabel 8

Kontribusi PDRB Non Migas ADHK calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap PDRB Non Migas ADHK Provinsi dari Tahun 2007 – 2011

No.	Kabupaten	Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Provinsi Tahun				
		2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
2	Kepulauan Kundur	-	-	2,19	2,10	2,10

Sumber: Konversi Data BPS Kabupaten Karimun Tahun 2012

Perhitungan indikator dari faktor ekonomi yaitu indikator PDRB Non Migas perkapita ADHB, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB Non Migas ADHB calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap PDRB Non Migas ADHB Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 9

Nilai Bobot PDRB Non Migas Perkapita ADHB, dan Hasil Perhitungan Rasio PDRB Non Migas Perkapita calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap Rata-rata Kabupaten Lain di Provinsi Kepri Pada Tahun 2011

No	Kabupaten	PDRB Non Migas Perkapita Tahun 2011 (Rupiah)	Rasio PDRB Non Migas Perkapita ADHB Kabupaten terhadap Rata-rata Kabupaten Lain di Prov. Kepri (%)	Nilai Bobot
1	2	3	4	5
1	Kepulauan Kundur	7.757.123,00	36,20	3
	Rata-rata PDRB Non migas Perkapita ADHB Kabupaten se Prov. Kepri	21.476.049,00		

Sumber: Hasil Olahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

Berdasarkan dari Tabel 9 di atas maka nilai faktor kemampuan ekonomi dari indikator pertumbuhan ekonomi, hasil perhitungan rasio pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan PDRB Non migas ADHK calon Kabupaten Kepulauan Kundur tahun 2011 terhadap Rata-rata PDRB Non Migas ADHK calon Kabupaten Kepulauan Kundur periode tahun 2009-2010 dikabupaten yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Tabel 10

Nilai Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Ekonomi Dilihat dari Pertumbuhan PDRB Non Migas ADHK Tahun 2011 terhadap Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas ADHK Periode Tahun 2009-2010 calon Kabupaten Kepulauan Kundur

No	Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi Dilihat dari Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2011 (%)	Rata2 pertumbuhan Ekonomi dilihat dari pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2009-2010	Rasio Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten tahun 2011 terhadap Rata2 Kabupaten yang bersangkutan periode sebelumnya (%)	Nilai / Bobot
1	2	3	4	5	6
2	Kepulauan Kundur	7,05	6,2	125	5

Sumber: Hasil Olahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

Sedangkan nilai kontribusi PDRB Non Migas ADHB dan hasil perhitungan rasio PDRB Non Migas ADHB Kabupaten calon Kepulauan Kundur terhadap Rata-rata Kabupaten di Provinsi Kepri adalah:

Tabel 11

Nilai Kontribusi PDRB Non Migas, dan Hasil Perhitungan Rasio Kontribusi PDRB Non Migas ADHB calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap Rata-rata Kontribusi PDRB Non migas ADHB Kabupaten se Provinsi Kepri Pada Tahun 2011

No	Kabupaten	Kontribusi PDRB Non Migas Kab. terhadap PDRB Prov. (%)	Rasio Kontribusi PDRB Non Migas Kab. terhadap Rata2 Kabupaten di Prov. Kepri (%)	Nilai / Bobot
1	2	3	4	5
2	Kepulauan Kundur	2,97	119	5
	Rata-rata Kontribusi PDRB Non Migas ADHB terhadap PDRB Non Migas ADHB Prov. Kepri	2,49		

Sumber: Hasil Olahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

Berdasarkan ketiga tabel tersebut di atas, maka nilai faktor dari ketiga indikator kemampuan ekonomi untuk calon Kabupaten Kepulauan Kundur adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 12

Nilai Faktor dari Indikator Kemampuan Ekonomi calon Kabupaten Kepulauan Kundur Tahun 2011

No	Indikator	Nilai Faktor
		Kabupaten Kepulauan Kundur
1	2	3
1	PDRB Non Migas Per Kapita ADHB	3
2	Pertumbuhan Ekonomi	5
3	Kontribusi PDRB Non Migas ADHB	5
Total		13

Sumber: Hasil Olahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

► **Hasil Perhitungan Bobot Nilai calon Kabupaten Kepulauan Kundur**

Berdasar kajian analisis pembentukan daerah kabupaten berdasarkan faktor dan indikator sesuai dengan PP 78 Tahun 2007 tersebut di atas, maka hasil perhitungan bobot nilai calon Kabupaten Kepulauan Kundur adalah sebagai berikut.

Tabel 13

Hasil Perhitungan Bobot Nilai Kabupaten Kepulauan Kundur

No	Faktor dan Indikator	Bobot	Nilai	Bobot Nilai
1	2	3	4	5
2.	Kemampuan Ekonomi	15		
	1. PDRB Non Migas	5	3	15
	2. Pertumbuhan Ekonomi	5	5	25
	3. Kontribusi Non Migas	5	5	25
				65

Sumber: Hasil Olahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

KESIMPULAN

Dari berbagai kajian analisis kemampuan ekonomi yang telah dijelaskan pada hasil bahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor kemampuan ekonomi dikaji dari berbagai aspek, meliputi Indikator PDRB Non Migas Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, Pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan pertumbuhan PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan serta kontribusi PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten terhadap PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Kepri.
2. Faktor kemampuan ekonomi juga harus memperhatikan nilai tambah bruto dari seluruh sektor kegiatan ekonomi yang terjadi dalam periode tertentu di mana PDRB merupakan indikator keberhasilan kemampuan ekonomi meliputi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB Atas dasar Harga Konstan.
PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku, adalah jumlah nilai bruto dari seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dalam periode tertentu, di mana PDRB Non Migas ADHB dan ADHK calon Kabupaten Kepulauan

Kundur seperti apa yang tergambar dalam tabel 3 dan 4 dengan rincian bahasan:

- a. Indikator pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi dihitung dengan menggunakan pertumbuhan nilai PDRB Non Migas ADHK pada tahun tertentu dibandingkan dengan pertumbuhan nilai PDRB Non Migas ADHK pada periode tahun sebelumnya. Dalam hal ini Kabupaten Kepulauan Kundur menggunakan perbandingan tahun 2011 dengan periode tahun 2008 - 2010.
- b. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Non Migas berdasarkan Harga Berlaku calon Kabupaten Kepulauan Kundur seperti apa yang terlihat dalam tabel 5 dalam penjelasan bahasan terdahulu.
- c. PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Laju pertumbuhan ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Non Migas berdasarkan Harga Konstan calon Kabupaten Kundur

sebagaimana terlihat dalam tabel 6 dalam bahasan pada penjelasan di atas.

c. Indikator Kontribusi PDRB

Kontribusi PDRB adalah kontribusi PDRB Non Migas kabupaten/kota terhadap PDRB Non Migas provinsi dan atau presentase PDRB Non Migas provinsi terhadap PDRB Nasional.

d. Kontribusi PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku

Indikator PDRB Non Migas ADHB calon Kabupaten Kepulauan Kundur berdasarkan Harga Berlaku terhadap PDRB Non Migas ADHB Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel 7 dalam rincian penjelasan pada bahasan terdahulu.

e. Kontribusi PDRB Non Migas Atas Dasar Harga Konstan

Indikator kontribusi PDRB Non Migas ADHK calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap PDRB Non Migas ADHK Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana pada tabel 8 rincian bahasan.

Perhitungan indikator dari faktor ekonomi yaitu indikator PDRB Non Migas perkapita ADHB, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB Non Migas ADHB calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap PDRB Non Migas ADHB Provinsi Kepulauan Riau.

3. Nilai Bobot PDRB Non Migas Per kapita ADHB, dan Hasil Perhitungan Rasio PDRB Non Migas Per kapita calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap Rata-rata Kabupaten Lain di Provinsi Kepri Pada Tahun 2011 mempunyai nilai bobot akhir adalah 3.

Berdasarkan nilai bobot yang dicapai, di atas maka nilai faktor kemampuan ekonomi dari indikator pertumbuhan

ekonomi, hasil perhitungan rasio pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertumbuhan PDRB Non migas ADHK calon Kabupaten Kepulauan Kundur tahun 2011 terhadap Rata-rata PDRB Non Migas ADHK calon Kabupaten Kepulauan Kundur periode tahun 2009-2010 dikabupaten yang bersangkutan.

4. Nilai Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Ekonomi Dilihat dari Pertumbuhan PDRB Non Migas ADHK Tahun 2011 terhadap Rata-rata Pertumbuhan PDRB Non Migas ADHK Periode Tahun 2009-2010 calon Kabupaten Kepulauan Kundur mendapatkan nilai bobot sebesar 5. Sedangkan nilai kontribusi PDRB Non Migas ADHB dan hasil perhitungan rasio PDRB Non Migas ADHB calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap Rata-rata Kabupaten di Provinsi Kepri.

5. Nilai Kontribusi PDRB Non Migas, dan Hasil Perhitungan Rasio Kontribusi PDRB Non Migas ADHB calon Kabupaten Kepulauan Kundur terhadap Rata-rata Kontribusi PDRB Non migas ADHB Kabupaten se Provinsi Kepri Pada Tahun 2011 mendapatkan nilai bobot 5. Sehingga berdasarkan ketiga nilai yang diperoleh dari hal tersebut di atas, maka nilai bobot dari ketiga indikator kemampuan ekonomi calon Kabupaten Kepulauan Kundur adalah sebagaimana penjelasan tersebut di atas yang meliputi : 1. PDRB Non Migas PerKapita ADHB; 2. Pertumbuhan Ekonomi; 3. Kontribusi PDRB Non Migas ADHB. calon Kabupaten Kepulauan Kundur memiliki atau mendapatkan nilai sebesar 13. Berarti Nilai kemampuan ekonomi yang diperoleh sebesar 65 point. Seperti yang tergambar dalam tabel di bawah ini :

Tabel 14
 Hasil Perhitungan Bobot Nilai Kabupaten
 Kepulauan Kunder

No	Faktor dan Indikator	Bobot	Nilai	Bobot Nilai
1	2	3	4	5
2.	Kemampuan Ekonomi	15		
	4. PDRB Non Migas	5	3	15
	5. Pertumbuhan Ekonomi	5	5	25
	6. Kontribusi Non Migas	5	5	25
				65

Sumber: Hasil Olahan Tim Kajian IPDN Tahun 2012

Berdasar kajian analisis pembentukan daerah kabupaten berdasarkan faktor dan indikator sesuai dengan PP 78 Tahun 2007 tersebut di atas, maka hasil perhitungan bobot nilai calon Kabupaten Kepulauan Kunder adalah sebagai berikut. Dari hasil perhitungan ketiga indikator persyaratan tersebut di atas, maka calon Kabupaten Kepulauan Kunder mendapatkan bobot kemampuan ekonomi sebesar 65 point, berarti pada aspek kemampuan ekonomi calon Kabupaten Kepulauan Kunder memenuhi salah satu persyaratan apa yang diisyaratkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penggabungan Daerah otonom.

SARAN/REKOMENDASI

Upaya dan aktivitas pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Kunder dari Kabupaten Karimun senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ikut sertakan atau ajak serta warga masyarakat yang selama ini berkarya diluar Kepulauan Kunder dan durai untuk sama-sama membangun daerah Kabupaten Kepulauan Kunder.

Potensi-potensi sumber daya alam yang tersedia kiranya dapat dikelola dengan memperhatikan kondisi dampak lingkungan, sehingga tidak merusak tata

ruang perkotaan dan pedesaan. Potensi-potensi yang dapat dikembangkan meliputi:

1. Potensi Parawisata pantai dan laut serta parawisata budaya, potensi kelautan, dengan mengembangkan dan meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya air tawar, dengan melakukan pembaruan pada sarana dan prasarana penangkapan, yang meliputi: Strutturisasi Kapal Penangkapan Ikan, dari kapal tradsisional, menjadi kapal-kapal tangkap ikan bermotor, agar dapat menangkap ikan ditengah laut, tidak hayna dipinghir pantai, dengan modernisasi kapal maka penangkapan ikan dapat sampai ketengah laut dengan cadangan ikan yang sangat banyak, sehingga produktivitas hasil tangkapan ikan laut semakin produktif, pengembangan budi daya air tawar, ini juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikermbangkan.
2. Pengembangan transformasi perekonomian, dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier dengan tetap memperhatikan kondisi sector primer. Karena sebagian masyarakat calon Kabupaten Kepulauan Kunder merupakan berusaha dan memiliki penghasilan dari sector primer.
3. Sumberdaya manusia calon Kabupaten Kepulauan Kunder, sangat mumpuni, di mana banyak para pejabat di Preovinsi Kepulauan Kepri dan dibeberapa Kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Kepri merupakan yang berasal dari Kepulauan Kunder, banyak tenaga tenaga terampil dari wilayah kunder bekerja diluar Kepulauan Kunder dan durai, sehingga apabila calon Kabupaten Kepulauan Kunder terbentuk, diyakini mereka akan kembali pulang untuk membangu Kabupaten barunya. Menjadi sebuah Kabupaten atau Daerah otonom yang dapat mengejar ketertinggalanya dari kabupaten/kota yang telah lahir terdahulu, menjadi daerah otonom.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan dan M Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan*, edisi Kelima, BPPE, Yogyakarta 1997.
- Pande Radja Silalahi, *Implikasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Pusat dan Pembangunan Ekonomi di Daerah*, Analisis CSIS, Tahun 1999/2000 No.1.
- M. Suparmoko, *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, edisi Pertama, Penerbit Andi Jogjakarta 2001.
- Faisal Basri, Haris Munandar, "Lanskap Ekonomi Indonesia Cetakan 1, Penerbit, Kencana Media Group Jakarta tahun 2009.
- Kuncoro, Mudrajad, 1990, *Political Economy of Decentralization in Indonesia: Toward Cultivating the Grassroots*, in *The Indonesia Quarterly* XX1/3.
- Osborne, David., and Ted Gaebler, 1995, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*.
- Perda, 2004, *Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2010 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Kecamatan Durai Yang Mempunyai Empat (4) Desa*
- Perda, 2012, *Peraturan Daerah Kabupaten Karimun No 2 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Karimun*.
- Badan Pusat Statitik Kabupaten Karimun "Karimun Dalam Angka Tahun 2012 "
- Laporan Hasil Kajian Akademik Pembentukan Calon Kepulauan Kundur dari Kabupaten Karimun Tahun 2012..
- Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007. *Tentang Pembentukan dan Penggabungan Wilayah Daerah Otonom*.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2013, Bappeda Kabupaten Karimun tahun 2012.
- Undang-undng 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan daerah*.
- Undang-undang 33 tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.

*) H. Basuki Rachmat, S.E., MM
adalah Dosen IPDN